

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi jamak (multidimensional), mencakup perubahan orientasi dan organisasi dari sistem social, ekonomi, politik, dan budaya. Pembangunan masyarakat desa diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan dan masalah secara bersama.¹

Ada pula yang mengartikan pembangunan masyarakat sebagai kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial ekonomi masyarakat, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pakar lain memberikan batasan bahwa pembangunan masyarakat adalah perpaduan antara pembangunan sosial ekonomi dan pengorganisasian masyarakat.²

Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina merupakan sebuah hubungan kerjasama antara dua negara yaitu Indonesia dan Cina. Dengan adanya pembangunan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan proyek pembangunan transportasi kereta masa depan yang akan menghubungkan dua kota megapolitan Jakarta dan Bandung yang dimana dengan dibangunnya sebuah transportasi masa depan ini digunakan untuk mempermudah masyarakat.

¹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006. h. 116.

² *Ibid.*, h. 118.

Dengan demikian pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) tidak hanya di negara maju saja tetapi di negara berkembang pun bisa dirasakan keberadaan transportasi darat kereta cepat ini. Proyek yang digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China *Railways*.

Pembangunan Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) memang memberikan dampak yang baik bagi suatu negara. Pada hakekatnya pembangunan itu dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat. Apalagi melihat desa/kelurahan yang dimana di wilayah itu masih banyak lahan kosong yang dijadikan sebagai bangunan infrastruktur yang membantu dalam memajukan daerah tersebut.

Masyarakat akan menerima pembangunan itu selama pembangunan memberikan pengaruh dan manfaat bagi mereka. Tetapi jika pembangunan tersebut membuat masyarakat merasa dirugikan maka terjadilah ketidakteraturan sosial yang dimana masyarakat memberontak dan melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan tersebut.

Seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Bandung Barat di Desa Mekarsari dimana Kampung Bantar Gedang terkena dampak proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Bangunan perumahan padat penduduk yang ditempati di wilayah Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari sedang berlangsung proses penggusuran dimana bangunan rumah penduduk sudah dihancurkan.

Pembangunan yang merupakan proyek besar Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang terjadi di Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat mendapat respon

yang kurang baik dari masyarakat. Sehingga munculah permasalahan karena masyarakat menolak adanya pembangunan KCIC yang disebabkan mereka merasa dirampas tempat tinggalnya.

Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Kontras lainnya bahwa kalau penganut teori fungsionalisme struktural melihat anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum, maka teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa.

Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan. Masing-masing golongan dipersatukan oleh ikatan kepentingan nyata yang bertentangan secara substansial dan secara langsung di antara golongan-golongan itu. Pertentangan itu terjadi dalam satu situasi dimana golongan yang berkuasa berusaha mempertahankan *status-quo* sedangkan golongan yang dikuasai berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan. Pertentangan kepentingan ini selalu ada setiap waktu dan dalam setiap struktur. Karena itu kekuasaan yang sah selalu berada dalam keadaan terancam bahaya dari golongan yang anti *status-quo*. Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai obyektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan (*coherence*) dengan posisi individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongannya itu, yang oleh Dahrendrof disebut sebagai peranan laten.

Dahrendrof membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe. Kelompok semua (*quasi group*) dan kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok semua merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok yang kedua yakni kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semua yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat.³

Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki sebuah stasiun Kereta Api terbesar yang berada di Daerah Operasi 2 Bandung yaitu stasiun Padalarang yang berada di Jalan Cihaliwung Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Dimana stasiun Padalarang ini memiliki lajur rel kereta api yang berdekatan dengan permukiman warga yaitu wilayah Kampung Bantar Gedang, Kampung Babakan Garut yang berada di Desa Mekarsari dan Ciburial Kavling, yang berada di Desa Margajaya.

Melihat proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang memang sudah lama direncanakan akan segera dirampungkan dan proses pengerjaannya pun semakin dipercepat dengan target di tahun 2021 proyek ini sudah selesai. Bangunan yang berada dekat dengan stasiun Padalarang sudah lebih dulu

³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Paradigma Ganda*, Jakarta: PT RajaGrafindo. h. 26-27.

dihancurkan memang sebelum adanya proyek KCIC ini, banyak sekali bangunan seperti ruko dan pasar yang berada di area sekitar stasiun ini.

Daerah selanjutnya yang akan terkena dampak pengusuran lahan yaitu di Bantar Gedang Desa Mekarsari. Dimana masyarakat di Bantar Gedang menolak pengusuran karena dengan adanya pembangunan proyek KCIC ini akan menyengsarakan warga Bantar Gedang. Sehingga masyarakat Bantar Gedang melakukan sebuah aksi demonstrasi untuk menolak pembangunan dengan cara mencorat coret dinding di setiap rumah penduduk menggunakan pilox dengan harapan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) ini bisa melihat keluhan masyarakat bahwa masyarakat tidak terima dan menolak keras pembangunan KCIC yang berdampak pada masyarakat yang berada di Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari.

Permasalahan yang terjadi dimana masyarakat merupakan warga yang telah tinggal bertahun-tahun lamanya di lingkungan itu dan sekarang lahan tersebut akan digunakan untuk proyek KCIC yang memakan lahan cukup luas. Sedangkan Proyek Pembangunan KCIC ini tidak memastikan akan memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak pengusuran. Proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina ini dimanfaatkan untuk kepentingan *developer* bukan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat yang berada di Bantar Gedang Desa Mekarsari dan wilayah yang terkena pengusuran melakukan aksi penolakan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi mendapatkan kompensasi karna terkena dampak akibat proyek tersebut, tetapi masyarakat melihat jauh ke depan bagaimana dampak dan manfaat dari adanya Kereta Cepat antara Bandung Jakarta yang dibadani oleh

PT. Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) apakah masyarakat akan merasakan secara langsung pembangunan proyek ini atau tidak.

Dengan demikian warga tidak setuju adanya pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) karena dengan pembangunan ini menyengsarakan warga dan proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) hanya dijadikan sebagai wadah untuk mengakomodasi kepentingan para pengusaha, orang besar dan para pejabat yang mempunyai modal. Sementara untuk manfaatnya sendiri tidak bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berangkat dari realitas kondisi di atas, penulis ingin meneliti lebih jauh lagi mengenai pembangunan KCIC (Kereta Cepat Indonesia Cina) terhadap masyarakat yang terkena penggusuran, yang membuat masyarakat menolak pembangunan KCIC tersebut. Penelitian ini penulis mengangkatnya dalam judul “KONFLIK AKIBAT PEMBANGUNAN KERETA CEPAT INDONESIA CINA (KCIC) DAN RESOLUSINYA (Penelitian di Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan di atas, maka penelitian ini mempunyai identifikasi masalah, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya pembangunan Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) yang kurang transparan baik kepada pemerintahan setempat maupun kepada para warga masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Masyarakat menolak dengan keras pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina yang sedang berlangsung di Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
3. Adanya resolusi dalam proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina yang terjadi di Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Rumusan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan ditolaknya Pembangunan KCIC di Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Dari masalah ini selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan peneliti yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindakan penolakan yang dilakukan masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat terhadap Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina ?

2. Bagaimana akibat dari Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina ini terhadap masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat ?
3. Bagaimana resolusi konflik terhadap penolakan pembangunan KCIC yang terjadi di masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Pembangunan KCIC di Kampung Bantar Gedang Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun tujuan khususnya dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menolak Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina.
2. Untuk mengetahui akibat Pembangunan Kereta Cepat Indonesia Cina ini terhadap masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk mengetahui penyelesaian konflik terhadap penolakan pembangunan KCIC yang terjadi di masyarakat Kampung Bantar Gedang Desa Mekarsari Kabupaten Bandung Barat.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian diantaranya:

1.5.1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial, terutama berkaitan dengan kajian masyarakat mengenai berbagai pembangunan yang dimana kita harus memperhatikan segala sesuatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

1.5.2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna bagi pengambil kebijakan seperti tokoh masyarakat, agama serta pihak pemerintah desa dalam mengatasi permasalahan masyarakat yang menolak keras akan adanya pembangunan KCIC tersebut. Dengan mengangkat penelitian ini, kita bisa tau penyelesaian yang diambil dari permasalahan tersebut.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1.6. Kerangka Pemikiran

Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara. Pengertian konflik menurut Robbins, konflik adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif pihak lain. Menurut Alabanness, pengertian konflik adalah kondisi yang dipersepsikan ada di antara pihak-pihak atau lebih merasakan

adanya ketidaksesuaian antara tujuan dan peluang untuk mencampuri usaha pencapaian tujuan pihak lain.

Dari kedua pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik adalah proses yang dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya. Dengan demikian jika suatu keadaan tidak dirasakan sebagai konflik, maka pada dasarnya konflik tersebut tidak ada dan begitu juga sebaliknya.

Teoritisi konflik melihat apa pun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas. Funkisional memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Teoritisi konflik menekankan pada peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Dahrendrof adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan *konsensus*). Teoritisi konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Dalam teori konflik masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya.

Konsep sentral teori konflik adalah wewenang dan posisi. Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur. Karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sanksi. Kesimpulan

penting yang dapat diambil adalah bahwa teori konflik ini ternyata terlalu mengabaikan keteraturan dan stabilitas yang memang ada dalam masyarakat di samping konflik itu sendiri. Masyarakat selalu dipandang dalam kondisi konflik. Mengabaikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku umum yang menjamin terciptanya keseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat seperti tidak pernah aman dari pertikaian dan pertentangan. Sebuah konflik terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara keinginan dan kenyataan yang ada. Salah satunya yaitu mengenai pembangunan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat dimana sebuah pembangunan yang mempunyai fungsi perubahan di daerah tersebut ditolak oleh warga masyarakat yang ada disekitarnya.

Pembangunan menurut Rogers adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka. Menurut Inayatullah, pengertian pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.

Shoemaker mengungkapkan pengertian pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi

melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial. Pendapat Kleinjans mengenai definisi dari pengertian pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran baru, meningkatnya semangat kemanusiaan dan suntikan kepercayaan diri. Dari pengertian pembangunan yang diungkapkan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat.

Pembangunan daerah adalah seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan pembangunan jangka pendek adalah menunjang atau mendukung keberhasilan pembangunan proyek – proyek penunjang daerah. Tujuan pembangunan jangka panjang adalah mengembangkan seluruh desa di Indonesia menjadi desa swasembada melalui tahap-tahap desa swadaya dan swakarya dan memperhatikan keserasian pembangunan daerah pedesaan dan daerah perkotaan, imbalan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat serta keterpaduan yang harmonis antara program sektoral atau regional dengan partisipasi masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.⁴

⁴ Daeng Sudirwo, *Pokok-pokok Pemerintahahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 1981. h. 64.

Meskipun konflik bisa merupakan gejala yang alamiah dan tidak dapat dielakan dalam kehidupan sosial, namun ia tidak harus berkepanjangan, sekurang-kurangnya dalam bentuk lahirnya. Sebaliknya, kehidupan sosial pada banyak tingkatan yang berbeda-beda memperlihatkan siklus perdamaian dan konflik, persahabatan dan permusuhan. Motivasi-motivasi untuk mengakhiri konflik bisa karena lelah atau bosan, atau lagi karena adanya keinginan untuk mencurahkan tenaganya untuk hal-hal lain.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana konflik itu diatasi atau diakhiri.

Simmel menganalisa beberapa bentuk atau cara mengakhiri konflik, termasuk menghilangkan dasar konflik dari tindakan-tindakan mereka yang sedang berkonflik, kemenangan pihak yang satu dan kekalahan di pihak yang lain, kompromi, perdamaian, dan ketidakmungkinan berdamai. Kemenangan satu pihak tidak selalu berarti bahwa pihak yang kalah sama sekali kehilangan kekuasaan untuk terus berjuang. Pihak yang kalah mungkin dengan bebas memilih untuk menyerah setelah mereka merasa bahwa hasilnya tidak bisa lain lagi. Dengan demikian, pihak yang kalah itu terhindar dari keharusan untuk membuang tenaga, suatu usaha yang sia-sia, dan sementara itu juga penting untuk menjaga gengsi untuk mampu mengadakan pilihan bebas.

Kompromi kelihatannya tidak mungkin terjadi apabila obyek konflik itu tidak dapat dibagikan (artinya tidak dapat dibagi antara pihak-pihak yang berkonflik). Tetapi Simmel menunjukkan bahwa pun dalam kasus-kasus seperti itu, kompromi dapat tercapai dengan memberikan suatu hadiah “hiburan” kepada pihak

⁵ Simmel, *Conflict an the Web of Group-Affiliations*, Newyork: Free Press, 1995. h. 111.

yang menderita kekalahan. Sesungguhnya konflik dapat diatasi oleh satu pihak dengan menyerahkan sesuatu yang bernilai sebagai pengganti benda yang disengketakan. Dalam hal ini Simmel mau menjelaskan secara singkat mengenai proses-proses pertukaran pada umumnya di mana pihak-pihak yang mengalami konflik kepentingan menukarkan benda-benda yang dapat digantikan dengan ukuran nilai objektif dari pada berusaha menggunakan kekuatan untuk memperleh apa yang mereka inginkan dari orang lain.⁶

Penyelesaian atau resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat memecahkan ketidakcocokkan utama diantara mereka, menerima keberadaan satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya dari resolusi konflik dan mendisinisikan kembali jalan pintas ke arah pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasi isu-isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya dalam menyelesaikan dan

⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. h. 273

mengakhiri konflik. Fisher et.al menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Dari uraian diatas dapat disusun kerangka konseptual penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

